

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

##### A. SEKTOR PENANAMAN MODAL

###### a. Arah dan Kebijakan BKPM

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu : **Pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **Kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

###### 1) Arah Kebijakan Pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 %/tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanamam modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) no-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

###### a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*), melalui:

1. Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
2. Peningkatan peran PMDN, khususnya UKM;

3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
5. Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
6. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanaman modal (*Investor needs*);
7. Fasilitas proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.

**b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui :**

1. Peningkatan peringkat kemudahan berusaha ( EODB )
2. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
3. Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan sistem potensi investasi regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to date*;
4. Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM;
5. Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM;
6. Pengusulan regulasi terkait intensif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.

**c) Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal, melalui :**

1. Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerja sama ekonomi dengan negara negara potensial;
2. Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan mou penanaman modal yang di implementasikan;
3. Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanaman modal indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negri (*outward investment*);
4. Peningkatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal; dan

5. Peningkatan kordinasi dengan K/L dan daerah pemanfaatan OSS.

**d). Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui :**

1. Fasilitas dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
2. Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan *market intelligence* kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta *market intelligence* negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
3. Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa *event* dan *platform* digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
4. Peningkatan peran dan fungsi kantor perwakilan BKPM diluar negeri (indonesia investment promotion center/ IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia.

**e). Meningkatkan kualitas penanaman modal, melalui :**

1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, antara lain melalui :
  - a. Penyempurnaan sistem OSS
  - b. Integrasi sistem K/L ke sisitem OSS
  - c. Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
  - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah
  - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
  - f. Layanan berbantuan OSS
  - g. Layanan pengaduan
2. Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanaman modal OSS;
3. Peningkatan kualitas pelayanan PTSP pusat;
4. Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
5. Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal

**f). Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui :**

1. Eksekusi bimbingan realisasi perusahaan besar ;
2. Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif ;

3. Penyelesaian permasalahan yang di hadapi perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan satgas percepatan berusaha;
4. Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
5. Optimalisasi pemanfaatan OSS dan *business intelligence* (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

**g). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:**

1. Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui :
  - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
  - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
  - c. Pengembangan kompetensi ASN;
  - d. Pelaksanaan *assessment test*;
  - e. Penyusunan pola karir instansional;
  - f. Pelaksanaan *talent pool*; dan
  - g. Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management*.
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui :
  - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
  - b. Penyusunan dan penerapan *standart operating procedure* (SOP)
  - c. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
  - d. Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data*) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
  - e. Peningkatan orgnisasi yng reponsif dan adaptif.
3. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui :
  - a. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
  - b. Penigkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
  - c. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
  - d. Peningkatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

4. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui :
  - a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
  - b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang undangan; dan
  - c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

**2) Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2021-2026 juga di arahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut :

**a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan :**

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.

**b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan :**

1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
2. Mendorong peningkatan angka *incremental capital output ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

**c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan :**

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;

2. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dengan upaya dalam pelaksanaan kemitraan usaha; dan
  3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *research & development* (R&D) serta pengembangan SDM.
- d) **Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar**, dengan :
1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
  2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran (a.l. *branding* ).
- e) **Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor**, dengan :
1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
  2. Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN); dan
  3. Peningkatan koordinasi dengan tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri ( P3DN ).
- f) **Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar**, dengan :
1. Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
  2. Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek berkelanjutan lingkungan; dan
  3. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.
- g) **Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri**, dengan :
1. Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
  2. Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya diluar pulau jawa;
  3. Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan

4. Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

## **B. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **a. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri**

Berdasarkan arah kebijakan pada RPJM 2021-2026, secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan desa dengan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang , mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB destinasi wilayah, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antara wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. Penataan pola hubungan pusat daerah, pengembangan kerja sama antar daerah, pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
5. Optimalisasi wilayah metropolitan (WM) dan kota besar di luar jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan WM dan kota besar di jawa;
6. Pengembangan rencana pemindahan ibu kota keluar pulau jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spesial dan ekonomi;
7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-kecil menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan;
8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
9. Peningkatan kapastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat;

10. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah.

Strategi pembangunan berbatas kewilayahan pada kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut :

**1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui :**

- a) Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat pertumbuhan wilayah / kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
- b) Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri, pengolahan, pariwisata dan lainnya.

**2. Strategi pemerataan melalui :**

Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya; dan pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Peran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”, untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut, maka ditetapkan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, serta peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan pedayagunaan

administrasi kependudukan, dan penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibun-linmas.

Mengacu pada Visi dan Misi Presiden serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2021-2026, maka Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021-2026 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam negeri mendapatkan penugasan untuk mengawal ketujuh program Nasional (PN) tersebut, yaitu:

- **PN-1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Berkualitas;
- **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- **PN-3** Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- **PN-4** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- **PN-5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan money follow program sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi kewilayahan, yaitu :

1. **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
2. **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
3. **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

**b. Arah dan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.**

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB Prioritas strategi dan kebijakan

Kementerian PAN dan RB sesuai rencana strategis Kementerian PAN RB difokuskan pada upaya-upaya:

- a. Penyesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan.
- c. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh mencakup:
  - 1). Penyusunan dan penyempurnaan berbagai implementasi perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistematis, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance*;
  - 2). Pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM aparatur dan instansi;
  - 3). Peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian;
  - 4). Perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektifitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen dan kenegaraan.

#### **c. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pelayanan Publik**

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas dan pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Sasaran strategis (SS) BKPM pada tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani. Indikator kinerja sasaran strategis pertahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2021-2026.

Beberapa target penanaman modal melakukam penyesuaian akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan revisi Target Penanaman Modal Tahun 2021-2026 Akibat Dampak Covid-19. Indikator kinerja sasaran strategis BKPM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.
- SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Peringkat Kemudahan Berusaha.
- SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.2.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jambi periode 2021-2026 yaitu:

***“Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing”***

#### 3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinis Jambi 2016-2021 sebanyak 4 sasaran yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Investasi, dengan Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.

Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan:

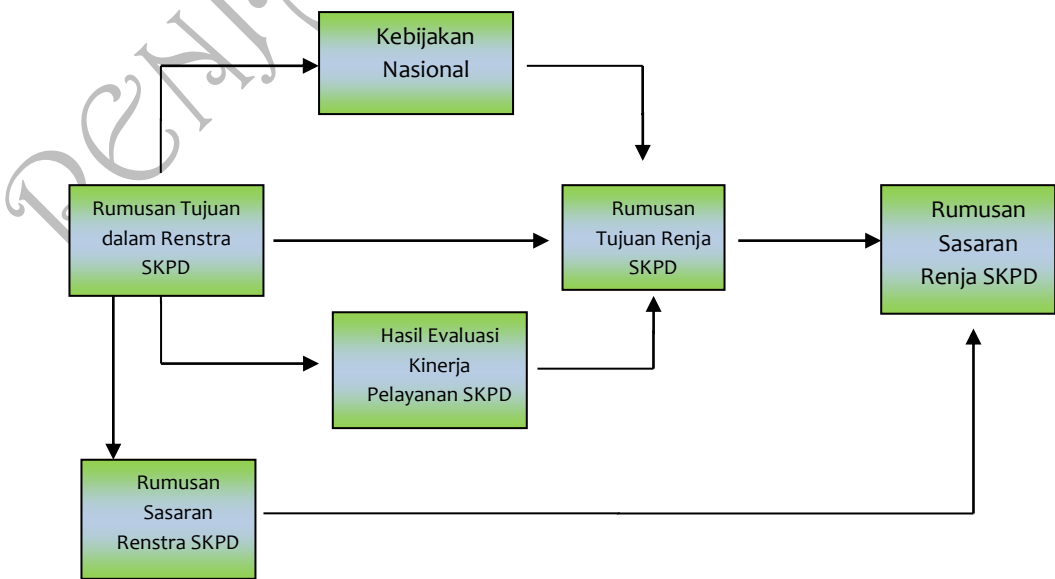
- Pertumbuhan realisasi investasi.

Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021-2026, maka maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi adalah:

1. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam kurun waktu satu tahun.
2. Sebagai implementasi rencana strategis untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai upaya nyata atau action plan SKPD dalam mewujudkan masyarakat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu yang mandiri dan profesional.
4. Sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Provinsi**



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun 2025 dan 2026

Jumlah program : 6  
Jumlah kegiatan : 11  
Jumlah sub kegiatan : 27  
Total pagu 2024 : Rp. 15.321.976.675,-

|                    |                                                                                       |                                                                |                                                 | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                |                   |                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Kode Rekening      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Tahun ini                                     |                   | Perkiraan Maju |                   | Lokasi                      |
|                    |                                                                                       |                                                                |                                                 | 2025                                          |                   | 2026           |                   |                             |
|                    |                                                                                       |                                                                |                                                 | Target                                        | Rp.               | Target         | Rp.               |                             |
| 1                  | 2                                                                                     | 3                                                              | 4                                               | 9                                             | 10                | 11             | 12                | 13                          |
| X.XX.01            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                |                                                 |                                               |                   |                |                   | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18               | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                            |                                                                |                                                 |                                               |                   |                |                   | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                          | Nilai Sakip                                                    | BB                                              | BB                                            | #####             | BB             | #####             | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.01       | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                       | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi          | 8 dokumen                                       | 10 dokumen                                    | 132.910.900       | 10 dokumen     | 132.910.900       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.01.01    | Penyusunan dokumen perencanaan PD                                                     | Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun                | 8 dokumen                                       | 10 dokumen                                    | 132.910.900       | 10 dokumen     | 132.910.900       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.01.06    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja | 1 laporan                                       | 1 laporan                                     | 0                 | 0              | 0                 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.02       | Administrasi keuangan Perangkat Daerah                                                | Periode penyediaan administrasi keuangan                       | 12 bulan                                        | 12 bulan                                      | 11.301.759.815    | 12 bulan       | 11.304.159.815    | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.02       | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     | Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN                      | 12 bulan                                        | 12 bulan                                      | 10.483.887.815,00 | 12 bulan       | 10.483.887.815,00 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.02.01.02 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                         | Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN          | 12 dokumen                                      | 12 dokumen                                    | 817.872.000       | 12 dokumen     | 820.272.000       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.05       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah pegawai dan PTT DPMPSTP Provinsi Jambi                  | 110 orang                                       | 110 orang                                     | 132.627.000       | 110 orang      | 210.729.840       | PROVINSI JAMBI              |
| X.XX.01.1.04.02    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | Jumlah pengadaan pakaian dinas                                 | n/a                                             | 110 orang                                     | 0,00              | 110 orang      | 78.102.840,00     | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.05.09    | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                         | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan                        | 20 orang                                        | 50 orang                                      | 132.627.000       | 20 orang       | 132.627.000       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.06       | Administrasi Umum Perangkat daerah                                                    | Periode penyediaan administrasi umum                           | 12 paket                                        | 12 paket                                      | 678.569.600       | 12 bulan       | 658.779.561       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.06.01    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik                   | 1 paket                                         | 6 paket                                       | 11.057.250        | 1 paket        | 11.057.250        | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.06.02    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                          | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor            | 4 paket                                         | 4 paket                                       | 308.416.289       | 4 paket        | 288.626.250       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.06.04    | Penyediaan bahan logistik kantor                                                      | Periode penyediaan bahan logistik kantor                       | 12 paket                                        | 12 paket                                      | 0                 | 12 paket       | 0                 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.06.05    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                             | Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan                 | 12 bulan                                        | 12 bulan                                      | 13.951.400        | 12 bulan       | 13.951.400        | DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI |
| 2.18.01.1.06.09    | Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                          | Periode penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi        | 1 laporan                                       | 1 laporan                                     | 345.144.661       | 1 laporan      | 345.144.661       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.08       | Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah                                     | Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah      | 12 laporan                                      | 12 laporan                                    | 414.000.000       | 12 bulan       | 374.000.000       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.08.02    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PDAM dan Internet | 12 bulan                                        | 12 bulan                                      | 279.000.000       | 12 bulan       | 239.000.000       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.08.04    | Penyediaan jasa pelayanan umum kebersihan kantor                                      | Periode pelayanan umum kebersihan kantor                       | 1 laporan                                       | 1 laporan                                     | 135.000.000       | 1 laporan      | 135.000.000       | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.09       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Periode pemeliharaan barang milik daerah                       | 64 unit                                         | 64 unit                                       | 453.040.349       | 44 unit        | 510.430.388       | PROVINSI JAMBI              |

|                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                    |                    |             |                    |             |                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 2.18.01.1.09.01   | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan                   | Jumlah pemeliharaan kendaraan                                                                                                                                                               | 24 unit            | 24 unit            | 296.240.349 | 24 unit            | 296.240.349 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.09.06   | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                                             | Jumlah pemeliharaan peralatan                                                                                                                                                               | 40 unit            | 40 unit            | 26.800.000  | 20 unit            | 26.800.000  | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.01.1.09.06   | Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                                        | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor                                                                                                                                                     | 1 unit             | 1 unit             | 130.000.000 | 1 unit             | 187.390.039 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                           | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi                                                                                                                                                  | 10%                | 10%                | 151.000.000 | 10%                | 151.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.02.02        | Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi                                                                                            | Jumlah realisasi investasi                                                                                                                                                                  | Rp.3, 9 Triliun    | Rp.6,28 Triliun    | 151.000.000 | Rp. 5,71 Triliun   | 151.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.02.02.01     | Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi                                                                              | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                                                                                | 1 dokumen          | 1 dokumen          | 151.000.000 | 1 dokumen          | 75.998.300  | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.02.02.02     | Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi                                                                                   | Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                                                                                            | n/a                | 1 dokumen          | 0           | 1 dokumen          | 75.001.700  | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                      | Persentase Peningkatan Rencana Investasi                                                                                                                                                    | 6,4 Triliun        | 10%                | 152.000.000 | 10%                | 152.000.000 | DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI |
| 2.18.03.1.01      | Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi                                                      | Jumlah rencana investasi                                                                                                                                                                    | 6,4 Triliun        | Rp.10,31 triliun   | 152.000.000 | Rp.11,34 triliun   | 152.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.03.1.01.01   | Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi                                                                      | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                                                      | n/a                | 1 dokumen          | 0           | 0                  | 0           | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.03.1.01.02   | Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                                                              | 1 dokumen          | 1 dokumen          | 152.000.000 | 1 dokumen          | 152.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                    | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                            | Nilai 90           | Nilai 90, A        | 464.000.500 | Nilai 90, A        | 464.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.04.1.02      | Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah provinsi                               | jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan                                                                                                             | 550 kegiatan usaha | 480 kegiatan usaha | 464.000.500 | 480 kegiatan usaha | 464.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.04.1.02'01   | Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi | n/a                | 110 pelaku usaha   | 156.000.000 | 110 pelaku usaha   | 156.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.04.1.02.02   | Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                            | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi                    | 550 kegiatan usaha | 480 kegiatan usaha | 153.000.000 | 480 kegiatan usaha | 153.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.04.1.02.03   | Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi                                                    | 100 orang          | 120 orang          | 155.000.500 | 120 orang          | 155.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                     | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Melaporkan LKPM                                                                                      | 1.802 pelaku usaha | 6%                 | 428.000.000 | 7%                 | 428.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.05.1.01      | pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB dan Melaporkan LKPM                                                                                                                             | n/a                | 1.205 pelaku usaha | 428.000.000 | 1.277 pelaku usaha | 428.000.000 | PROVINSI JAMBI              |
| 2.18.05.1.01.0006 | Bimbingan teknis kepada pelaku usaha                                                                                                 | Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bimbingan teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko                          | n/a                | 330 pelaku usaha   | 428.000.000 | 120 pelaku usaha   | 166.037.000 | PROVINSI JAMBI              |

|                 |                                                                   |                                                                                                                           |                  |                    |       |                   |             |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| 2.18.05.1.01.03 | Pengawasan penanaman modal                                        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan                             | 2 kegiatan usaha | 80 kegiatan usaha  | 0     | 50 kegiatan usaha | 227.913.000 | PROVINSI JAMBI |
| 2.18.05.1.01.01 | Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | n/a              | 100 kegiatan usaha | 0     | 10 kegiatan usaha | 34.050.000  | PROVINSI JAMBI |
|                 |                                                                   |                                                                                                                           |                  |                    | ##### |                   | #####       |                |

JAMBI,   JANUARI 2025  
KEPALA DINAS

DR. DONNY ISKANDAR, S.SOS, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691125 199703 1 004

RENJA DPMPTSP 2026

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP  
Provinsi Jambi

| N<br>O | Sasara<br>n                                            | Program/Kegia<br>tan                                    | Indikator<br>Kinerja                                | Data<br>Capaian<br>Pada<br>Awal<br>Tahun<br>Perenca<br>naan | Target Capaian Pada<br>Akhir Tahun<br>Perencanaan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |     |                 |     |                 |          |                 |     |                 |     |                 |     | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |                     |      |      |      |      |      |      |      | Rasio Capaian Pada Tahun ke- |      |   |      |    |      |   |      |    |      |   |      | Unit<br>Pena<br>nggu<br>ng<br>Jawa<br>b |      |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|----------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|---|------|----|------|---|------|----|------|---|------|-----------------------------------------|------|---|------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|        |                                                        |                                                         |                                                     |                                                             |                                                   | 1                                         |     | 2               |     | 3               |          | 4               |     | 5               |     | 6               |     | 2021                        |      | 2022 |      | 2023                |      | 2024 |      | 2025 |      | 2026 |      | 1                            |      | 2 |      | 3  |      | 4 |      | 5  |      | 6 |      |                                         |      |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|        |                                                        |                                                         |                                                     |                                                             |                                                   | (1)                                       | (2) | (3)             | (4) | (5)             | (1)+3:27 |                 | (7) |                 | (8) |                 | (9) |                             | (10) |      | (11) |                     | (12) |      | (13) |      | (14) |      | (15) |                              | (16) |   | (17) |    | (18) |   | (19) |    | (20) |   | (21) |                                         | (22) |   | (23) |    | (24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| K      |                                                        | Rp                                                      |                                                     | K                                                           |                                                   | Rp                                        |     | K               |     | Rp              |          | K               |     | Rp              |     | K               |     | Rp                          |      | K    |      | Rp                  |      | K    |      | Rp   |      | K    |      | Rp                           |      | K |      | Rp |      | K |      | Rp |      | K |      | Rp                                      |      | K |      | Rp |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1      | Meni<br>ngkat<br>nya<br>Realis<br>asi<br>Invest<br>asi | Program<br>Pengembang<br>an Iklim<br>Penanaman<br>Modal | Persentase<br>Peningkatan<br>Realisasi<br>Investasi | Rp. 3,9<br>T                                                | 10%                                               | 2.139.998.720                             | 10% | 399.999.<br>360 | 10% | 399.999.<br>360 | 10%      | 420.000.<br>000 | 10% | 440.000.<br>000 | 10% | 460.000.<br>000 | 10% | 480.000.<br>000             |      |      |      | 225.<br>109.<br>922 |      |      |      |      |      |      |      |                              |      | - |      |    |      |   |      |    |      |   |      |                                         |      |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Uraian                                                                                                             | Anggaran pada Tahun |                |            |      |      | Realisasi Anggaran pada |                  |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan |         |      |      |      | Rata-rata   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------|------|-------------------------|------------------|------|------|------|----------------------------|---------|------|------|------|-------------|-----------|
| Penanaman Modal                                                                                                    | ke-                 |                |            |      |      | Tahun ke-               |                  |      |      |      | Anggaran Tahun ke-         |         |      |      |      | Pertumbuhan |           |
|                                                                                                                    | 2021                | 2022           | 2023       | 2024 | 2025 | 2021                    | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 | 2021                       | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | Anggaran    | Realisasi |
| (1)                                                                                                                | (2)                 | (3)            | (4)        | (5)  | (6)  | (7)                     | (8)              | (9)  | (10) | (11) | (12)                       | (13)    | (14) | (15) | (16) | (17)        | (18)      |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 30.036.500.00       | 177.622.800.00 | 160000000  |      |      | 29.374.500.00           | 174.052.000.00   |      |      |      | 98%                        | 98%     |      |      |      |             |           |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 145.830.149.00      | 0              | 0          |      |      | 138.016.900.00          | 0                |      |      |      | 95%                        | #DIV/0! |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 8.919.379.472.00    | 9570600946     | 9019167973 |      |      | 7.876.445.468.00        | 9.119.105.111.00 |      |      |      | 88%                        | 95%     |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 264.283.750.00      | 350916550      | 361894150  |      |      | 260.233.750.00          | 350.916.550      |      |      |      | 98%                        | 100%    |      |      |      |             |           |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 9.000.000.00        | 45032000       | 65261000   |      |      | 9.000.000.00            | 29.809.903       |      |      |      | 100%                       | 66%     |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 65.390.300.00       | 45049360       | 45049360   |      |      | 65.103.000.00           | 44.982.000       |      |      |      | 100%                       | 100%    |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 221.301.007.00      | 324650156      | 195825330  |      |      | 218.416.500.00          | 323.567.000      |      |      |      | 99%                        | 100%    |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 47.279.000.00       | 51300000       | 41976000   |      |      | 44.050.000.00           | 49.755.200       |      |      |      | 93%                        | 97%     |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 29.763.100.00       | 26214360       | 24731800   |      |      | 29.760.600.00           | 26.172.000       |      |      |      | 100%                       | 100%    |      |      |      |             |           |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 187.696.483.00      | 287625209      | 257765310  |      |      | 153.071.586.00          | 252.670.807      |      |      |      | 82%                        | 88%     |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 199.116.048.00      | 419520245      | 248520000  |      |      | 161.185.818.00          | 194.794.690      |      |      |      | 81%                        | 46%     |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 170.027.851.00      | 137329011      | 137329011  |      |      | 169.124.600.00          | 136.210.900      |      |      |      | 99%                        | 99%     |      |      |      |             |           |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 344.437.200.00      | 307172000      | 307172000  |      |      | 337.182.900.00          | 302.316.300      |      |      |      | 98%                        | 98%     |      |      |      |             |           |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 85.350.000.00       | 62200000       | 62200000   |      |      | 82.200.000.00           | 62.200.000       |      |      |      | 96%                        | 100%    |      |      |      |             |           |

|                                                                                                                                      |                |           |           |  |  |                |                |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------|--|--|--|---------|---------|--|--|--|--|--|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                         | 569.141.400.00 | 0         | 0         |  |  | 562.840.000.00 | 0              |  |  |  | 99%     | #DIV/0! |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                                              | 139.568.500.00 | 226999934 | 199999900 |  |  | 132.208.800.00 | 225.109.922.00 |  |  |  | 95%     | 99%     |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                                   | 147.924.651.00 | 0         | 0         |  |  | 133.515.720.00 | 0              |  |  |  | 90%     | #DIV/0! |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                     | 146.239.200.00 | 414999962 | 379000299 |  |  | 142.760.576.00 | 388.944.688.00 |  |  |  | 98%     | 9%      |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan            | 311.000.274.00 | 226123650 | 205123650 |  |  | 295.635.100.00 | 216.824.069.00 |  |  |  | 95%     | 96%     |  |  |  |  |  |
| Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 0.00           | 332000000 | 265000000 |  |  | 0.00           | 296.629.500.00 |  |  |  | #DIV/0! | 89%     |  |  |  |  |  |
| Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                            | 453.000.000.00 | 245000000 | 199999950 |  |  | 414.662.600.00 | 232.332.205.00 |  |  |  | 92%     | 95%     |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   | 130.132.000.00 | 0         | 0         |  |  | 117.287.433.00 | 0              |  |  |  | 90%     | #DIV/0! |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                    | 362.079.450.00 | 531384444 | 708566500 |  |  | 318.111.000.00 | 484.552.694.00 |  |  |  | 88%     | 91%     |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   | 253.984.550.00 | 255876556 | 559988404 |  |  | 228.072.985.00 | 210.253.262.00 |  |  |  | 90%     | 82%     |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                |                |           |           |  |  |                |                |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |

Tabel T-C.28.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator                                        | Kondisi Kinerja pada awal | Target Capaian Setiap Tahun |                |                |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
|    |                                                  | periode RPJMD             |                             |                |                |                |                |                                          |
|    |                                                  | Tahun 0                   | Tahun 1 (2021)              | Tahun 2 (2022) | Tahun 3 (2023) | Tahun 4 (2024) | Tahun 5 (2025) |                                          |
| 1  | 2                                                | 3                         | 4                           | 5              | 6              | 7              | 8              | 9                                        |
| 1  | Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)  | 0,4 Triliun               | 742.525.49                  | 562.555.84     | 667.196,67     |                |                |                                          |
| 2  | Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah) | 3,5 Triliun               | 6.204.193.90                | 8.882.659.20   | 10.404.989,40  |                |                |                                          |
| 3  | Nilai IKM                                        | A                         | A                           | A              | A              |                |                |                                          |
|    |                                                  |                           |                             |                |                |                |                |                                          |

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)\* Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Jambi

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                              |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                              |                                                                      |                                                                                     | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    | 2                                                                     | 3                                                                            | 4                                                                    | 5                                                                                   | 6                                                                  | 7                                            | 8=(7/6)               | 9                                                              | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
| 1    |    |    |    | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar |                                                                              |                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
| 1    | 01 |    |    | Bidang Urusan Penanaman Modal                                         |                                                                              |                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
| 1    | 01 | 01 |    | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                            | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi                                   | 10%                                                                  | 10%                                                                                 | 10%                                                                | 20%                                          | 199%                  | 10%                                                            | 16%                                                                            | 161%                                         |
| 1    | 01 | 01 | 01 | Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi                             | Jumlah realisasi investasi                                                   | Rp. 4,72 Triliun                                                     | Rp. 4,72 Triliun                                                                    | Rp. 4,72 Triliun                                                   | Rp. 9,4 Triliun                              | 199%                  | Rp. 4,29 T                                                     | Rp. 6,9 T                                                                      | 161%                                         |
| 1    | 01 | 01 | 02 | Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi               | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | 1 Dokumen                                                            | 1 Dokumen                                                                           | 1 Dokumen                                                          |                                              | 100%                  | 1 Dokumen                                                      | 1 Dokumen                                                                      | 100%                                         |
| 1    | 01 | 01 | 03 | Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi                    | Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi                             | 0 Dokumen                                                            | 0 Dokumen                                                                           | 1 Dokumen                                                          | -                                            | 0%                    | 1 Dokumen                                                      | 1 Dokumen                                                                      | 100%                                         |

|   |    |    |    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                    |                    |      |                    |                    |      |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|
|   | 01 | 02 |    | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                               | Persentase peningkatan rencana investasi                                                                                                                                                                  | 10%                | 10%                | 10%                | 10.0               | 100% | 10%                | 10%                | 100% |
| 1 | 01 | 02 | 01 | <b>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi</b>                                               | <b>Jumlah rencana investasi</b>                                                                                                                                                                           | Rp. 7, 78 Triliun  | Rp. 7, 78 Triliun  | Rp. 7, 78 Triliun  | <b>7.80</b>        | 100% | Rp. 7,04 T         | Rp.7 T             | 100% |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi                                                                      | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                                                                    | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | -                  | 0%   | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100% |
| 1 | 01 | 02 | 02 | Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                                                                            | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100% | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100% |
| 1 | 01 | 04 | 03 | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                          | Nilai 90, A        | Nilai 90, A        | Nilai 90, A        | 89,31 (A)          | 100% | Nilai 90, A        | Nilai 89, A        | 100% |
| 1 | 01 | 04 | 01 | <b>Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah provinsi</b>                        | jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan                                                                                                                           | 560 kegiatan usaha | 560 kegiatan usaha | 560 kegiatan usaha | 577 kegiatan usaha | 103% | 550 kegiatan usaha | 650 kegiatan usaha | 118% |
| 1 | 01 | 04 | 02 | Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi               | 100 pelaku usaha   | 100 pelaku usaha   | 100 pelaku usaha   | 114 pelaku usaha   | 114% | 100 pelaku usaha   | 100 pelaku usaha   | 100% |
| 1 | 01 | 04 | 03 | Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                            | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha | 560 kegiatan usaha | 560 kegiatan usaha | 560 kegiatan usaha | 463 kegiatan usaha | 83%  | 550 kegiatan usaha | 560 kegiatan usaha | 100% |

|   |    |    |    |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |      |                    |                    |      |
|---|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|
| 1 | 01 | 04 | 04 | Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi | 110 orang          | 110 orang          | 110 orang          | 162 Orang          | 147% | 100 Orang          | 102 orang          | 100% |
| 1 | 01 | 04 |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                   | Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM                                   | 3%                 | 3%                 | 3%                 | 6.30%              | 210% | 2%                 | 3%                 | 100% |
| 1 | 01 | 04 | 01 | <b>pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi</b>                                   | Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM                                                                          | 1.103 pelaku usaha | 1.103 pelaku usaha | 1.103 pelaku usaha | 1.762 pelaku usaha | 160% | 1.071 Pelaku Usaha | 1.080 Pelaku Usaha | 100% |
| 1 | 01 | 04 | 01 | Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                               | 300 pelaku usaha   | 300 pelaku usaha   | 300 pelaku usaha   | 231 Pelaku Usaha   | 77%  | 100 Pelaku Usaha   | 100 Pelaku Usaha   | 100% |
| 1 | 01 | 04 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal                                                        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan                                            | 60 kegiatan usaha  | 60 kegiatan usaha  | 60 kegiatan usaha  | 51 kegiatan usaha  | 85%  | 11 kegiatan usaha  | 40 kegiatan usaha  | 363% |
| 1 | 01 | 04 | 03 | Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal                                                        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                | 100 kegiatan usaha | 100 kegiatan usaha | 100 kegiatan usaha | n/a                | 0%   | 0                  | 0                  | 0%   |
| 1 | 01 | 05 |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                      | Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik                                                          | 100%               | 100%               | F100%              | n/a                | 0%   | 100%               | 0%                 | 0%   |

|   |    |    |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |           |           |           |     |    |    |    |    |
|---|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|----|----|----|
| 1 | 01 | 05 | 01 | Urusan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi                                 | Tersedianya buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan                                                                                                | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | n/a | 0% | 0  | 0  | 0% |
| 1 | 01 | 05 | 01 | Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | n/a | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 01 | 03 | 02 | Dst .....                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |           |           |           |     |    |    |    |    |
|   |    |    | 03 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |           |           |           |     |    |    |    |    |

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP  
Provinsi Jambi

| NO | Indikator                                        | SPM/<br>standar<br>nasional | IKK                                              | Target Renstra Perangkat Daerah |              |         |              | Realisasi<br>Capaian |               | Proyeksi |              | Catatan<br>Analisis |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|----------------------|---------------|----------|--------------|---------------------|
|    |                                                  |                             |                                                  | Tahun                           | Tahun        | Tahun   | Tahun        | Tahun                | Tahun         | Tahun    | Tahun        |                     |
|    |                                                  |                             |                                                  | 2021                            | 2022         | 2023    | 2024         | 2021                 | 2022          | 2023     | 2024         |                     |
|    |                                                  |                             |                                                  | (thn<br>n-2)                    | (thn<br>n-1) | (tnn n) | (thn<br>n+1) | (thn<br>n-2)         | (thn n-<br>1) | (tnn n)  | (thn<br>n+1) |                     |
| 1  | 2                                                | 3                           | 4                                                | 5                               | 6            | 7       | 8            | 9                    | 10            | 11       | 12           | 13                  |
| 1  | Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)  |                             | Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)  | 0.44                            | 0.48         | 0.5     | 0.6          | 0.74                 | 0.56          | 0,67     |              |                     |
| 2  | Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah) |                             | Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah) | 3.85                            | 4.24         | 4.7     | 5.1          | 6.20                 | 8.88          | 10.40    |              |                     |
| 3  | Nilai IKM                                        |                             | Nilai IKM                                        | A                               | A            | A       | A            | A                    | A             | A        | A            |                     |
|    |                                                  |                             |                                                  |                                 |              |         |              |                      |               |          |              |                     |
|    |                                                  |                             |                                                  |                                 |              |         |              |                      |               |          |              |                     |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada Tahun 2026 nanti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merencanakan akan melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program yang didukung oleh 10 (sepuluh) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **4.1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN RUTIN**

##### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Tujuan program ini yaitu tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebanyak 6 yaitu :

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

###### **1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 132.910.900,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

##### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

###### **1. Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.483.887.815,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

###### **2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.820.272.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan honorarium pegawai tidak tetap dan honor

pejabat panitia kegiatan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

### **3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

#### **1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.102.840,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan Pengadaan Dinas untuk Karyawan/ Karyawati DMP-PTSP Provinsi Jambi

#### **2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 132.627.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur DPM-PTSP dengan mengikuti diklat.

### **4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

#### **1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.057.250,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan alat listrik dan peralatan elektronik selama 12 bulan yang dipergunakan untuk kelancaran sarana penerangan bangunan kantor.

#### **2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 288.626.250,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan pengadaan peralatan gedung dan perlengkapan kantor.

#### **3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.951.400,-

Tujuan sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan atau fotocopy rutin kantor.

#### **4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.345.144.661,- Tujuan sub kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka sinkronisasi tugas DPM-PTSP Provinsi Jambi selama 12 bulan serta pelaksanaan makan minum rapat selama 12 bulan.

**5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah.**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 239.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan dan pembayaran rekening listrik, PDAM dan internet selama 12 bulan.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1350.000.000,-  
Tujuan sub kegiatan melaksanakan pelayanan umum, penyediaan jasa kebersihan kantor dan taman .

**6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 296.240.349,-  
Tujuan sub kegiatan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.800.000,-  
Tujuan sub kegiatan melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya selama 12 bulan.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 187.390.039,-  
Tujuan sub kegiatan melaksanakan paket pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.

**II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

---

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu:

**1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.998.300,-

Tujuan sub kegiatan untuk mensinergikan antara aparat DPM-PTSP, pengusaha PMA/PMDN dan stake holder dalam kontribusinya pada pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.001.700,-

Tujuan sub kegiatan tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Jambi.

**III. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan investasi potensial dan peluang investasi di Provinsi Jambi guna menarik investor dalam negeri dan luar negeri, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu:

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 0,-

Tujuan sub kegiatan melaksanakan promosi investasi potensial dan peluang investasi di provinsi Jambi guna menarik investor Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 152.000.000,- Tujuan sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi.

#### **IV. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi Investor PMA/PMDN untuk berkonsultasi dan mengelola pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal, ada 1 (satu) Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu :

##### **1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan berusaha melalui sistem perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 156.000.000,-  
Tujuan sub kegiatan terfasilitasinya pelaku usaha dan terpenuhinya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 153.000.000,-  
Tujuan sub kegiatan jumlah izin dan non izin pelaku usaha yang terfasilitasi dari pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko.  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 155.000.000,-  
Tujuan sub kegiatan untuk melakukan mediasi jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan berusaha PMA/PMDN.

#### **V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan PMA/PMDN terhadap pelaksanaan Penanaman Modal, ada 1 (satu) Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu :

**1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadin kewenangan Daerah Provinsi**

1. Sub Kegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 166.037.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha PMA/PMDN dan Aparatur DPM-PTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 227.913.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pengawasan kegiatan usaha dari pelaku usaha PMA/PMDN yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan Aparatur DPM-PTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

3. Sub Kegiatan penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.050.000,-

Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan pelaku usaha PMA/PMDN yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal.

RENJA DPMPTSP 2026

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja ( RENJA ) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. **Community Base Depelopment** (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan **Good Government** sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja ( RENJA ) juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang,

Jambi, Januari 2025

Kepala Dinas,

**Dr. Donny Iskandar, S.Sos, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691125 199703 1 004